



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYAMSUDDIN
2. Jabatan : KEPALA BALAI BESAR
3. NHK : 497167

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.494.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 154 m ² /70 m ² di KAB / KOTA KOTA MAKASAR BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 154.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 154 m ² /70 m ² di KAB / KOTA KOTA MAKASAR BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m ² /45 m ² di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000		
4. Tanah Seluas 340 m ² di KAB / KOTA MAMUJU, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 12 m ² /20 m ² di KAB / KOTA MAMUJU, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000		
6. Tanah Seluas 21.500 m ² di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	320.000.000
1. MOBIL, HONDA HONDA FREED Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA YARIS SEDAN Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	277.421.816



F. HARTA LAINNYA	Rp.	175.000.000
Sub Total	Rp.	3.266.421.816
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.266.421.816

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpн.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpн.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila di kemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

- | | | |
|------------|---|---|
| 1. Nama | : | AHMADI |
| 2. Jabatan | : | PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR |
| 3. NHK | : | 791754 |

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	---
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	4.000.000
1. MOTOR, HONDA METIK Tahun 2018, HASIL SENDIRI	Rp.	
4.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	19.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.052.472
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	26.552.472
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	26.552.472

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila di kemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi penuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUMUH MUHARAM
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 792917

II. DATA HARTA

	Rp.	
A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	40.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA SUKABUMI , HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	52.000.000
1. MOTOR, YAMAHA MIO M3 MATIC Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000		
2. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	7.416.322
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	99.416.322
III. HUTANG	Rp.	218.541.729
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-119.125.407

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FINA ARPAH
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 859704

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	10.855.010.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/220 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 855.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 981 m2/2.500 m2 di KAB / KOTA TASIKMALAYA , HIBAH TANPA AKTA Rp. 10.000.010.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	194.000.000
1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
2. MOBIL, HONDA HONDA HR-V Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	5.949.316
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	11.054.959.316
III. HUTANG	Rp.	376.920.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	10.678.039.316

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ASEP ILHAM
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 794238

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.223.750.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 42 m²/60 m² di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah Seluas 392 m² di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 238.000.000
3. Tanah Seluas 3.645 m² di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
4. Tanah Seluas 1.260 m² di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 58.500.000
5. Tanah Seluas 980 m² di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
6. Tanah Seluas 568 m² di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 8.200.000
7. Tanah Seluas 140 m² di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
8. Tanah Seluas 1.050 m² di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
9. Tanah Seluas 1.022 m² di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 14.600.000
10. Tanah Seluas 658 m² di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
11. Tanah Seluas 700 m² di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA ,



HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000		
12. Tanah dan Bangunan Seluas 95 m ² /76 m ² di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
13. Tanah Seluas 3.500 m ² di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 43.750.000		
14. Tanah Seluas 980 m ² di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 6.300.000		
15. Tanah Seluas 1.050 m ² di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000		
16. Tanah Seluas 2.324 m ² di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 49.800.000		
17. Tanah Seluas 224 m ² di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000		
18. Tanah Seluas 280 m ² di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 2.600.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	53.350.000
1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA/MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
2. MOTOR, HONDA VARIO/MATIC Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000		
3. MOTOR, YAMAHA MIO M3/MATIC Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 2.100.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	22.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	256.658.465
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.549.090
F. HARTA LAINNYA	Rp.	146.983.287
Sub Total	Rp.	1.706.290.842
III. HUTANG	Rp.	522.150.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.184.140.842

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **GITA NURDINIATI**
2. Jabatan : **PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR**
3. NHK : **884058**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	750.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m ² /120 m ² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	220.000.000
1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	29.816.991
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	999.816.991
III. HUTANG	Rp.	68.400.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	931.416.991

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.